

PELAKSANAAN PASAL 41 (D) PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
SEBAGAI SYARAT POLIGAMI

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg : 1115 / CH / 91
Cal Number : 1115 PE / A
Proses tgl :



PERPUSTAKAAN
- UNIVERSITAS SURABAYA -
OLEH
UNIVERSITAS SURABAYA -

WIEKE WIDYAWATI

NRP 2860052

NIRM 86.7.004.12021.44818

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA

1991

Surabaya, Juli 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Wieke Widyawati

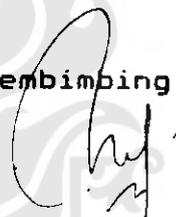
Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H.MS.



J. Bambang Soenarjo, S.H.



UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 menganut asas monogami. Walaupun demikian ketentuan ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu seorang suami diperkenankan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami. Mengenai ini tidak ditunjukkan kepada semua warganegara Indonesia, karena keseluruhannya ini adalah tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing maksudnya diperkenankan dan tidaknya seseorang berpoligami adalah berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, sehingga apabila melarangnya berarti poligami menjadi tidak sah. Dikatakan tidak sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Selain alasan dan syarat-syarat sebagaimana dikemukakan di atas, masih terdapat syarat yang lain yang boleh dikatakan sangat menentukan apabila dibandingkan dengan syarat yang lain. Syarat tersebut adalah jaminan

perlakuan adil dari suami kepada isteri-isterinya dan anaknya sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 41 (d) PP No. 9 Tahun 1975. Jaminan perlakuan adil ini harus didukung oleh penghasilan suami yang diterimanya dalam setiap bulan. Bagi suami yang bekerja sebagai pegawai negeri diperoleh dari atasannya persetujuan poligami dan penghasilan yang diterimanya dan apabila tidak bekerja surat keterangan penghasilan diperoleh dari Lurah diketahui oleh Camat.

Alasan-alasan dan syarat-syarat serta pernyataan jaminan adil yang dikuatkan oleh atasan masing-masing yang berkaitan dengan penghasilan dan Lurah yang diketahui oleh Camat bagi yang tidak bekerja diajukan bersama-sama pada hakim untuk memperoleh penetapan dan diikuti pula keharusan hadir isteri-isteri untuk membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat secara tertulis dan dapat pula secara lisan tetapi harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Apabila surat pernyataan dan surat-surat lain tersebut dikabulkan dan memperoleh penetapan hakim berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik. Surat pernyataan perlakuan adil ini berarti merupakan suatu janji atau perjanjian

jian yang dibuat suami terhadap isteri-isteri dan anaknya. Karena merupakan suatu perjanjian, maka seharusnya diberikan suatu sanksi keberadaannya. Oleh karena suatu perjanjian maka yang dipermasalahkan adalah, sampai sejauh mana eksistensi atau keberadaan surat pernyataan dalam ketentuan pasal 41 (d) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai syarat poligami ?

Penyusunan skripsi ini selain didasarkan pada studi kepustakaan juga didukung adanya wawancara pada instansi tertentu yang dirasa ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan agar dapat pembahasannya didukung oleh suatu data yang valid, sehingga dalam memberikan jawabannya akan diperoleh suatu jawaban yang sempurna atau mendekati kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah menggunakan metode juridis normatif yang mendasarkan pada sistematika peraturan perundang-undangan beserta asas-asasnya yang mempunyai kekuatan mengikat. Data-data tersebut bersumberkan pada bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang akan dijelaskan oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari wawancara. Kemudian data dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan

mengklasifikasi data yang ada sedang bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan instansi P.A. Kotamadya Surabaya. Selanjutnya diolah secara deduktif maksudnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai poligami pada umumnya ditarik ke dalam hal yang bersifat khusus mengenai surat pernyataan berlaku adil. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dimaksudkan agar memudahkan dalam penuangan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh menunjukkan bahwa keberadaan surat pernyataan khususnya bagi yang beragama Islam adalah mutlak, karena ternyata Surat An Nissa hukumnya adalah sunnah maksudnya bila dilanggar tidak berdosa, tetapi bila ditinggalkan berpahala. Oleh karena keberadaannya adalah mutlak dan berbentuk penetapan hakim yang berisikan tentang suatu janji berlaku adil, maka surat pernyataan tersebut adalah otentik. Sehingga memang seharusnya dalam pelaksanaannya apabila ternyata menyimpang dari surat pernyataan terhadap suami tersebut diberikan suatu sanksi berupa tuntutan gan-

ti rugi dari isteri-isterinya. Ketentuan yang demikian ini tertera dalam surat pernyataan perlakuan adil yang berkaitan dengan sanksi tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat pernyataan berlaku adil adalah mutlak dan surat pernyataan ini hanyalah salah satu syarat saja sebagai upaya untuk berpoligami yang diharuskan adanya dukungan dari alasan dan syarat-syarat yang lain sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan adanya surat pernyataan dari isteri-isterinya mengenai kesanggupan untuk dimadu. Sehingga dapat dikatakan syarat-syarat tersebut secara keseluruhan adalah mutlak diperlukan dalam arti apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka jelas permohonan untuk berpoligami yang diajukan tidak akan diterima, atau permohonannya akan ditolak.